

APAKAH PENGELUARAN PEMERINTAH MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Fivien Muslihatinningsih¹, Caren Alvidiar², Regina Niken Wilantari³
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember^{1,2,3}
fivien.feb@unej.ac.id, Carenalvd11@gmail.com, reginanikenw.feb@unej.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
06 Maret 2023

Tanggal Revisi:
23 Maret 2023

Tanggal Diterima:
29 Maret 2023

Publikasi On line:
31 Maret 2023

Abstract

This study aims to analyze the effect of government spending on the education, health and infrastructure sectors on the Human Development Index (IPM) in East Java. The variables used are HDI, government spending in the education, health and infrastructure sectors. This study uses secondary data in East Java in the form of quantitative data from 11 regencies in the Tapal Kuda Region and Madura Island in 2017-2021. The research data is sourced from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. The data analysis method used is panel data analysis using the Fixed Effect Model (FEM) method. The results showed that government spending on the education and infrastructure sectors had a negative and significant effect on the HDI in East Java, while the health sector had a positive and significant effect on the HDI in East Java. Based on individual effect analysis, it shows that the effect of government spending on the education, health and infrastructure sectors is highest in Banyuwangi Regency. Meanwhile, the lowest influence was in Sampang Regency.

Key Words: HDI, Governmen Spending, Education, Health, Infrastructure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Variabel yang digunakan adalah IPM, pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Penelitian ini menggunakan data sekunder di Jawa Timur berupa data kuantitatif dari 11 Kabupaten di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura pada tahun 2017-2021. Data penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistika dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode analisis data yang digunakan analisis data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan infrastruktur mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur, sedangkan sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur. Berdasarkan analisis individual effect, menunjukkan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur paling tinggi berada pada Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan, pengaruh paling rendah terdapat pada Kabupaten Sampang.

Key Words: IPM, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri dan kebebasan individu (Todaro, 2011). Tujuan dalam suatu pembangunan manusia agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik, pertama adanya peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang kebutuhan hidup yang pokok, kedua yakni peningkatan standar hidup bukan dilihat melalui pendapatan namun juga ketersediaan tenaga kerja, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian pada nilai-nilai budaya dan kemanusiaan (Todaro, 2011). Berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, Suparmoko (1996) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, dimana diharapkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Meier dan Rauch dalam Winarti et al., (2014) suatu bangsa harus memiliki tingkat investasi yang tinggi dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai standar ekonomi dan kehidupan bangsa yang lebih baik. Tidak hanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan

kesehatan saja yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dimana infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung proses pertumbuhan ekonomi, infrastruktur juga sebagai gambaran pemerataan pembangunan yang terjadi (Larassita, 2016:23). (Larassita, 2016) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa anggaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur. Selain itu, (Kuncoro, 2016) dalam penelitiannya juga menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM. Pembangunan manusia perlu mendapat perhatian karena permasalahan- permasalahan utama yang terjadi dalam sebuah negara yaitu permasalahan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan lain- lain. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. IPM akan menjadi cerminan keyakinan keberhasilan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangkitkan perekonomian yang sedang terpuruk. IPM juga menjadi penting dikarenakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum. Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. (Todaro & Smith, 2003:434). Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten dan Kota, dimana terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Banyaknya jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, masing-masing kabupaten memiliki kondisi sumber daya manusia (SDM) yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat tergambarkan dengan tingkat IPM Provinsi Jawa Timur per Kabupaten/Kota pada Grafik di bawah ini.



Gambar 2.1: Grafik IPM di Wilayah Tapal Kuda, Pulau Madura, dan Jawa Timur pada tahun 2017-2021(%)

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2017-2021

Grafik 2.1 menunjukkan bahwa Wilayah Tapal Kuda dan pulau Madura, sebagian besar bahkan hampir seluruh kabupatennya berada pada tingkatan IPM paling rendah. Wilayah Tapal Kuda tersebut meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, dimana Wilayah ini seringkali dianggap sebagai daerah yang tertinggal di Jawa Timur. Dan untuk Pulau Madura meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Maka dari itu, perlu adanya intervensi dari pemerintah dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pembangunan di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura melalui indikator- indikator yang menjadi pembentuk IPM. Larassita (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa anggaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur. Selain itu, Kuncoro (2016) dalam penelitiannya juga menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap IPM. Penelitian yang memberikan hasil berbeda dilakukan oleh (Simanjutak & Ginting, 2019), dimana dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh pengeluaran pemerintah untuk kesehatan melalui pertumbuhan ekonomi dan IPM, dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan IPM. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan juga infrastruktur terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Dengan pengeluaran pemerintah di ketiga sektor tersebut baik akan memperbaiki kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, dan tentunya akan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan juga meningkatnya IPM.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia menurut BPS memiliki ide pokok yang mendasar yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Pembangunan manusia ini memiliki tujuan, salah satu tujuannya secara umum yaitu memberikan pilihan kepada masyarakat untuk hidup penuh kebebasan dan bermartabat dengan menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (BPS, 2016:7). Secara konvensional, pembangunan SDM diartikan sebagai investasi human capital yang harus dilakukan sejalan dengan investasi physical capital. Dimana pembangunan manusia ditempuh melalui upaya pendidikan dan pelatihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas dan pengembangan entrepreneurial. Karenanya indikator kinerja pembangunan SDM mencakup indikator-indikator pendidikan, kesehatan, dll (Sun'an & Senuk, 2015:105)

Modal Manusia (*Human Capital*) dalam Pembangunan

Schultz (1961) menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. Pengeluaran langsung untuk pendidikan, kesehatan, dan internal migrasi untuk memanfaatkan kesempatan kerja yang lebih baik adalah penerapannya. *Human capital* dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini berarti semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan human capital. Pendidikan dan pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga juga akan meningkatkan produktifitas. Pendidikan dan kesehatan merupakan dasar dari tujuan suatu pembangunan, kesehatan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan, sedangkan peran penting pendidikan dalam suatu negara berkembang yaitu menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Todaro menyatakan, "Modal manusia adalah investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi sering kali dihasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan program pelatihan dalam pekerjaan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai dalam pemilihan lokasi" (Todaro, 2011:445-447). Istilah modal manusia sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas (Todaro, 2011:452). Dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan pendapatan saja tidaklah cukup. Terdapat hubungan kausalitas yang berlangsung dua arah, yaitu pendapatan yang lebih tinggi akan membuat warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik menghasilkan produktivitas yang tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Dengan adanya hubungan kausalitas tersebut maka terciptalah suatu paket kebijakan terpadu, yaitu pembangunan yang difokuskan pada pendapatan, kesehatan, dan pendidikan secara bersamaan (Todaro, 2011:449). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan dasar modal manusia berfokus pada kemampuan tak langsung dari kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Todaro, 2011:452)

Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki atau dengan kata lain IPM merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Baik dari sisi kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Menurut Human Development Report pertama tahun 1990 pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks

pembangunan manusia memfokuskan pada tiga dimensi, pembangunan manusia yang terukur, meliputi : berumur panjang dan sehat, berpendidikan atau terdidik serta hidup berkecukupan atau mempunyai standart hidup yang layak. Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir pengetahuan diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli.

Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi

Teori W.W Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang di timbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang di alami banyak negara, tetapi tidak didasarkan pada suatu teori tertentu. Bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina tenaga serta vitalitas rakyat Schultz (1961). Reksodadijoprojo (2001:1) menjelaskan tentang ekonomi publik, dimana membicarakan bagaimana peran negara atau pemerintah dalam menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang bersifat umum, menurut Adam Smith, pemerintah hanya memiliki tiga fungsi dalam suatu negara, yaitu pertama fungsi untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, kedua untuk menyelenggarakan peradilan, dan yang ketiga untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dan sebagainya. Sektor swasta tidak dapat sepenuhnya menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat karena pihak swasta hanya akan menyediakan kebutuhan masyarakat yang akan memberikan keuntungan besar bagi pihak swasta (Hasyim, 2016:5). Todaro & Smith (2003:58) berpendapat bahwa besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas SDM. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan minimal 20% dana APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan, sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022), sedangkan untuk bidang kesehatan dalam ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara diluar gaji sedangkan untuk daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diluar gaji. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Indonesia memiliki persentase terkecil. Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa kebijakan sosial di bidang kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya didukung komitmen pemerintah, padahal pembangunan di bidang kesehatan merupakan satu pilar pengentasan kemiskinan dan faktor penentu IPM (Kurniangsih, n.d.:15-16)

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Pembangunan Manusia

Jika suatu negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya maka tidak akan dapat memanfaatkan potensi mereka dalam pembangunan, hal ini merupakan pemikiran dari Profesor Frederick Harbison. Terdapat anggapan bahwa, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang penduduk maka akan semakin baik pula kesempatan penduduk tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan tinggi dan jaminan hidup yang lebih baik. Dan akibat dari munculnya anggapan tersebut, tingkat pengeluaran pemerintah di negara-negara berkembang untuk bidang pendidikan melonjak sangat tajam (Todaro, 2000:338). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mutlak diperlukan, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam upaya peningkatan kualitas penduduk. Dengan kondisi pendidikan penduduk yang baik dapat digambarkan dengan tingkat produktivitas penduduk yang tinggi, hal ini merupakan upaya dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan ini merupakan salah satu dari wujud *government expenditure*, dimana merupakan kebijakan fiskal yang sebagian diarahkan untuk memberikan dana kepada masyarakat khususnya dalam bentuk dana pembangunan. Menurut Sumarsono (2003:58) pendidikan berperan meningkatkan kualitas SDM, dalam menghadapi persaingan bebas, masyarakat membutuhkan dukungan semua pihak untuk meningkatkan kualitas sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang memiliki daya saing. Agar tidak tertinggal dengan masyarakat internasional maka peningkatan pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dalam Pembangunan Manusia

Kesehatan Merupakan hal mendasar bagi kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu, kesehatan adalah hak bagi setiap masyarakat sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan UUD Nomor 23 tahun 1945 tentang hak setiap masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Kesehatan merupakan kunci utama dari kesejahteraan hidup, tanpa kesehatan warga negara tidak bisa melakukan proses produksi, yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan perlindungan dan fasilitas kesehatan, hal ini disebutkan dalam UUD 1945 bahwa kesehatan

merupakan hak asasi manusia dan dalam tujuan pembangunan telah disebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan (Astri et al., 2013). Todaro & Smith (2003) “menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, yang diatur oleh UUD Nomor 36 Tahun 1945 tentang anggaran kesehatan yang berbunyi bahwa anggaran pemerintah sebesar 5% dialokasikan dari APBN diluar gaji, dan 10% dari tingkat daerah atau APBD diluar gaji”.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Dalam Pembangunan Manusia

Menurut konsep *Human Capital* pemilihan lokasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas SDM, jadi dengan adanya pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dapat menjadi investasi yang produktif terhadap lokasi di sekitar masyarakat (Todaro, 2011:445-447). Larassita, 2016:25) menjelaskan bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan berdampak pada penyediaan fasilitas umum yang memadai dan perumahan yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Jika infrastruktur gagal dipenuhi oleh pemerintah maka akan berdampak kepada kehidupan masyarakat dengan kondisi rendahnya kualitas/daya saing penduduk, keadaan ini dapat digambarkan dengan rendahnya tingkat produktivitas penduduk. Di hampir seluruh negara berkembang, standar hidup sebagian penduduknya berada pada level yang rendah, sebutan rendah ini dapat dibandingkan dengan standar hidup kaum elit di negara itu sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut dapat digambarkan dengan jumlah pendapatan uang yang sangat sedikit, perumahan yang kurang layak, peluang mendapat pekerjaan sangat rendah, dsb (Todaro, 2000:52). Kali & Brata (2016) menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur merupakan *social overhead capital* yaitu barang-barang modal yang menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha menghasilkan dan meningkatkan produksi, misalnya sarana perumahan, penyediaan transportasi, pelabuhan, bandara dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat perkembangan suatu wilayah, digambarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu wilayah memiliki infrastruktur yang lengkap maka dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan berbeda pula dengan wilayah yang memiliki infrastruktur yang minim, maka pendukung kesejahteraan masyarakat sangatlah terbatas. Tingkat indeks pembangunan manusia di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja. Dimana modal manusia adalah investasi produktif terhadap orang-orang, mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan, dan lokasi seringkali dihasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan program pelatihan dan pekerjaan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur, yang memadai dalam pemilihan lokasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Akumulasi modal salah satunya dapat terbentuk melalui adanya investasi. Investasi pemerintah dalam penelitian ini berupa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Menurut teori dari Todaro tentang modal manusia, ia menyatakan bahwa modal manusia merupakan investasi produktif terhadap pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan lokasi, sesuai dengan dasar teori tersebut maka pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan lokasi dapat mempengaruhi kualitas SDM yang dapat diukur dengan tingkat IPM,

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode explanatory. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur sebagai variabel dependen, dan menggunakan variabel independen meliputi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah disusun dan dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah penggabungan dari data time series tahun 2017 sampai 2021 dan data cross section dari 11 Kabupaten di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi data panel dengan aplikasi Eviews 12 dan menggunakan metode *Fixed Effect Model* dengan kriteria pengujian apabila ($p\text{-value} < 0,05$) dan dilakukan uji statistik, dan uji asumsi klasik. Adapun fungsi model ekonomi dari variabel-variabel tersebut, sebagai berikut:

$$IPM = f(PDD, KES, INF)$$

Selanjutnya mentransformasikan fungsi tersebut ke dalam model ekonometrika, sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1PDD_{it} + \beta_2KES_{it} + \beta_3INF_{it} + \epsilon_{it}$$

Interpretasi model dalam logaritma:

$$IPM = \alpha + \beta_1 \log PDDit + \beta_2 \log KESit + \beta_3 \log INFit + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- PDD = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan
- KES = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan
- INF = Pengeluaran Pemerintah di Sektor Infrastruktur
- α = Intercept
- β_{it} = Koefisien Variabel
- ϵ = Error Term
- i = 1,2,..., n (banyaknya sampel/observasi)
- t = 1,2,.., t (banyaknya waktu)

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengujian menghasilkan bahwa *Fixed Effect Model* sebagai model regresi yang cocok. Berikut merupakan hasil dari uji Hausman dari penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1:

Tabel 1. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation : Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	13.632.773	3	0.0035

Data Diolah, 2023

Tabel 1 Menunjukkan diperoleh nilai Chi Square sebesar dengan 0.0035 probabilitas (P-value) sebesar 0.0035 kurang dari (<) 0,05, maka diputuskan menggunakan FEM. Hasil pengolahan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan FEM bertujuan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dari pengaruh pengeluaran pemerintah di ketiga sektor. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam membandingkan antara nilai probabilitas (P- value) dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Berikut hasil estimasi persamaan regresi data panel:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan FEM

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 03/26/23 Time: 20:09
Sample: 2017 2021
Periods include: 11
Total panel (balanced) observation: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	56.49881	8.472300	6.668651	0.0000
LOG(PDD)	-0.294703	0.111235	-2.649376	0.0114
LOG(KES)	1.138563	0.442376	2.573747	0.0138
LOG(INF)	0.305660	0.202434	1.509921	0.1387

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.910548	Mean dependent var	65.902273
Adjusted R-squared	0.882186	S.D. dependent var	2.310210
S.E. of regression	0.782959	Akaike info criterion	2.589238
Sum squared resid	25.78012	Schwarz criterion	3.100196
Log likelihood	-57.20405	Hannan-Quinn criter.	2.786830
F-statistic	32.10371	Durbin-Watson stat	1.221462
Prob(F-statistic)	0.000000		

Data Diolah, 2023

Nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar 56.49881 artinya apabila variabel pengeluaran pemerintah konstan, maka tingkat IPM sebesar 56.49881 % yang diakibatkan variabel lain. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar - 0.294703, artinya apabila variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meningkat, maka IPM akan berkurang sebesar - 0.294703 %. Koefisien bernilai negatif yang artinya bahwa bila pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan mengalami peningkatan maka pertumbuhan perekonomian akan mengalami penurunan. Selain itu nilai probabilitas dari variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan sejumlah $0,0114 < \text{nilai } \alpha = 5\%$ artinya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar 1.138563, artinya apabila variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan meningkat, maka IPM akan meningkat sebesar 1.138563. Selain itu nilai probabilitas dari variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sejumlah $0,0138 < \text{nilai } \alpha = 5\%$ yang mempunyai arti pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur sebesar - 0.305660, artinya apabila variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur meningkat, maka IPM akan meningkat sebesar - 0.305660 % dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan konstan. Selain itu nilai probabilitas dari variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sejumlah $0,1387 > \text{nilai } \alpha = 5$. Sedangkan untuk *individual effect* setiap kabupaten memiliki pengaruh yang berbeda-beda yakni pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur pada kabupaten Bangkalan dan Sampang memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini, yang mana pengaruh terbesar yakni pada kabupaten Banyuwangi sebesar 4.384059, sedangkan pengaruh yang paling kecil yakni pada kabupaten Bangkalan yakni sebesar -2.441060, yang mana setiap kabupaten atau daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola daerahnya.

Tabel 3. Hasil *Individual effect*.

CROSSID	Effect
1 LUMAJANG	-0.653109
2 JEMBER	0.232509
3 BANYUWANGI	4.384059
4 BONDOWOSO	-0.099405
5 SITUBONDO	0.894469
6 PROBOLINGGO	-0.517703
7 PASURUAN	2.191176
8 BANGKALAN	-2.441060
9 SAMPANG	-4315922
10 PAMEKASAN	0.148516
11 SUMENEP	0.176470

Data Diolah, 2023

Pengujian Asumsi Klasik dilakukan menggunakan tiga Uji yakni, Uji Multikolinearitas yang digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak, dimana regresi yang baik

seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebasnya. Jika matrik korelasi tersebut tidak ada nilai lebih dari (>) 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model. Hasil uji Multikolinearitas dalam model ini dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

	PDD	KES	INF
PDD	1.000000	0.224309	-0.066813
KES	0.224309	1.000000	0.116276
INF	-0.066813	0.116276	1.000000

Data Diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel independen kurang dari (<) 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen tidak terdapat masalah multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan Uji Heteroskedastis yang bertujuan menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

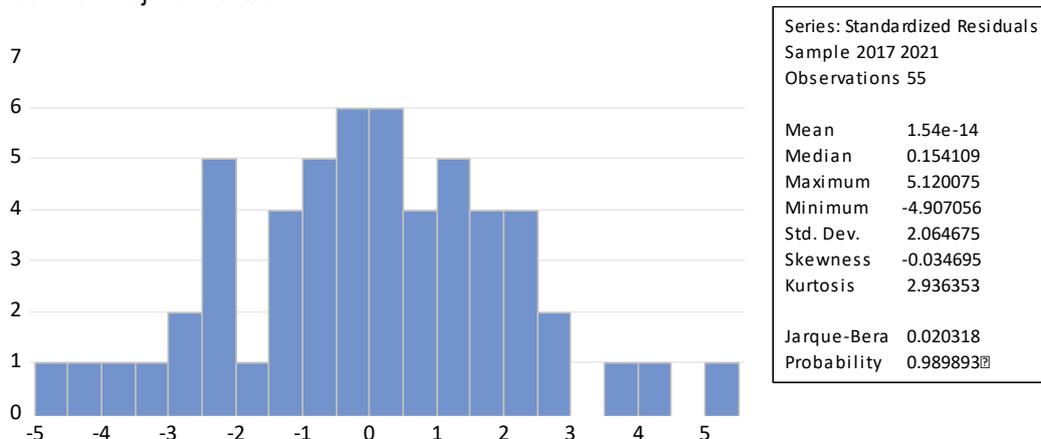
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	2.035.815	2.477.856	0.821604	0.4161
LOG(PDD)	0.002806	0.032532	0.086244	0.9317
LOG(KES)	-0.066614	0.129380	-0.514875	0.6094
LOG(INF)	-0.034375	0.059205	-0.580603	0.5647

Data Diolah, 2023

Tabel 5 menunjukkan hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser Probabilitas di setiap variabel dependen memiliki nilai lebih dari $\alpha = 5\%$ (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

Selanjutnya dilakukan Uji Normalitas yang digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel-variabel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak, dimana variabel-variabel tersebut yaitu variabel dependen dan variabel independen. Hasil uji Normalitas dalam model ini dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1 Uji Normalitas



Data Diolah, 2023

Gambar 1 Menunjukkan hasil uji normalitas, dapat dilihat nilai probabilitas dari hasil uji tersebut menunjukkan nilai probabilitas lebih dari $\alpha = 5\%$, yakni senilai 0.989893 maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji hipotesis dilakukan dengan pengujian statistic, untuk mengetahui pengaruh variabel dependent terhadap variabel *independent* untuk Uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 32.10371 dan Probabilitas F-(Statistik) sebesar 0.000000, dari hasil tersebut terbukti bahwa probabilitas F- (Statistik) lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Uji T menunjukkan nilai Probabilitas variabel $INF > \alpha 5\%$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang berarti secara uji individu Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk variabel lainnya yaitu PDD dan KES memiliki nilai probabilitas $< \alpha 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara uji individu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dan sektor Kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Uji R^2 menunjukkan nilai R-squared sebesar $0.882186 \times 100\% = 88,2186\%$ artinya total variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 11,7814% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai dengan 2021. Disimpulkan bahwa variabel dependen secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM, sehingga ketika variabel dependen mengalami peningkatan akan diikuti dengan meningkatnya tingkat IPM di Wilayah Tapal kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Secara parsial disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan juga kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh secara tidak signifikan terhadap IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura. Dari hasil koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mempengaruhi IPM sebesar 88%, hasil ini dapat dilihat pada nilai adjusted R-squared, sedangkan sisa persennya sebesar 12% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Hasil Estimasi Individual Effect Model Fixed Effect Model

Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel independent terhadap subjek penelitian, maka dilakukan estimasi *Individual Effect*. Adanya perbedaan tingkat individual effect diakibatkan karena adanya perbedaan pengaruh dari masing-masing variabel dependent. Nilai positif memiliki arti bahwa perubahan IPM yang terjadi di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura dipengaruhi oleh ketiga variabel independent, dan begitu sebaliknya. Berdasarkan hasil *individual effect*, masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri, kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Pamekasan, dan Sumenep memiliki koefisien yang positif, artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap IPM. Berbanding terbalik dengan wilayah lainnya memiliki koefisien negative yang mana dapat diartikan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap perubahan IPM yang ada di wilayah tersebut.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil regresi menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan hasil Individual effect pada kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Sedangkan pada kabupaten lainnya memiliki pengaruh positif. Hasil ini tidak sesuai dengan teori *human capital* yang dinyatakan oleh Schultz (1961) bahwa merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara, dan yang mana berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro bahwasanya "Modal manusia adalah investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi". Pengeluaran pemerintah sektor ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, peran ini berupa investasi pendidikan, dimana tersebut akan mendatangkan keuntungan di masa depan, keuntungan dalam konteks ini yaitu kondisi pendidikan yang membaik waktu demi waktu dan dapat meningkatkan kualitas SDM yang pada akhirnya akan meningkatkan pula produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan teori modal manusia. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana et al. (2017) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016. Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Imron & Satria (2018) bahwa pengeluaran fungsi pendidikan secara langsung

berpengaruh negative terhadap IPM. Terlepas dari bentuk usaha pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan, peran serta masyarakat juga merupakan hal yang penting, sehingga peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Jika dilihat dari permasalahan kemiskinan, menurut MPI (Multidimensional Poverty Index) Indonesia, bahwa tak kurang dari 10,1 juta penduduk miskin pada umumnya bermukim di wilayah sekitar selat madura yaitu daerah Tapal Kuda dan Pulau Madura, dimana daerah-daerah tersebut merupakan kantong kemiskinan di Provinsi paling timur Pulau Jawa. Dari masalah ini dapat mengakibatkan kesadaran untuk kewajiban bersekolah menjadi terabaikan, karena kesibukan orang tua yang bekerja untuk bertahan hidup dan mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. Dilihat dari sisi geografisnya, daerah Tapal Kuda dan Pulau Madura merupakan daerah pesisir yang pada umumnya memiliki penduduk dengan angka buta huruf yang tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak mereka.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil regresi menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif signifikan terhadap IPM, sesuai hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil *Individual effect* pada kabupaten Bangkalan dan Sampang memiliki pengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan pada kabupaten lainnya memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Sesuai dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan masyarakat merupakan faktor penting tercapainya kesejahteraan hidup, tanpa kesehatan warga negara akan menjadi beban negara. Dengan kondisi kesehatan yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas, yang dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya karena kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, pemerintah juga berkewajiban untuk mengalokasikan tiap pengeluaran sektor kesehatan secara merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian, (Arifin et al., 2015), (Larassita, 2016), (Syalkahfi, 2016) dan (Kuncoro, 2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat IPM. Arifin et al. (2015) menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan peningkatan pada APBD khususnya sektor kesehatan agar dapat meningkatkan pembangunan manusia, anggaran yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan lainnya. Menurut Larassita (2016) pada negara berkembang pemerintah diharuskan menyediakan lebih banyak sarana publik untuk mendukung proses pembangunan, sehingga realisasi anggaran pemerintah salah satunya pada sektor kesehatan jelas akan membengkak. Kuncoro (2016) menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau dan berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang berdampak baik pada perbaikan ekonomi masyarakat. Dalam penerapannya anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan sangatlah banyak dan naik setiap tahunnya yang menyebabkan dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil regresi menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Berdasarkan hasil *Individual effect* pada kabupaten Situbondo dan Pasuruan memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan pada kabupaten lainnya memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Infrastruktur dalam konteks penelitian ini yaitu penyediaan perumahan dan fasilitas umum, yang mana kedua hal tersebut dapat menunjang kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk, menurut Todaro dan Smith (2003), pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan pembangunan, yang nantinya dapat digunakan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi abad ke-20 dibandingkan beberapa abad sebelumnya adalah pembangunan infrastruktur (World Bank, 1994). Dengan adanya lokasi yang memiliki infrastruktur yang memadai kehidupan masyarakat lebih terjamin dan sejahtera, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM. Infrastruktur merupakan kebutuhan tersier masyarakat yang harus dipenuhi. Di negara berkembang penyediaan infrastruktur menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan membutuhkan dana yang besar untuk penyediaannya, karena dapat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bergantung pada produktivitas tenaga kerja, sedangkan produktivitas yang tinggi bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Untuk membentuk SDM yang berkualitas maka kebutuhan fisik masyarakat seperti kebutuhan

primer, sekunder dan tersier harus terpenuhi dengan baik. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fisik seperti perumahan dan fasilitas umum, yang mana kedua hal tersebut merupakan faktor pendorong kesejahteraan penduduk, dapat kita ketahui bahwa pada saat ini pemerintah sedang menjalankan program KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bersubsidi pemerintah, program ini merupakan perwujudan dari paket kebijakan jilid XIII milik Presiden Jokowi, bentuk usaha pemerintah ini dapat meningkatkan standar hidup warga negaranya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulyanto (2016) bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat IPM Provinsi Bengkulu. Penelitian lain dilakukan Suparno (2014) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian serupa dilakukan (Safira et al., 2019), dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh secara negatif signifikan terhadap IPM. Dalam penelitiannya Safira juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan berbagai programnya untuk melaksanakan berbagai programnya seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih sehingga belum mampu memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan IPM. Dikarenakan untuk pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur tidak dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, karena pembangunan infrastruktur memerlukan waktu cukup panjang untuk dapat digunakan oleh masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan penelitian ditarik kesimpulan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan investasi dalam bidang pendidikan membutuhkan waktu dan proses yang panjang sehingga pengaruh dari adanya investasi di sektor pendidikan dapat dirasakan, dan terlepas dari bentuk usaha pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan, peran serta masyarakat juga merupakan hal yang penting. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya karena kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, dengan kondisi kesehatan yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dan adanya SDM yang berkualitas maka dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Untuk membentuk SDM yang berkualitas maka kebutuhan fisik masyarakat seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier harus terpenuhi dengan baik yang merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fisik seperti perumahan dan fasilitas umum merupakan faktor pendorong kesejahteraan penduduk. Pemerintah harus terus menerus meningkatkan alokasi dana pada ketiga sektor dan diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM dan pemerintah harus lebih giat berusaha untuk merangkul masyarakat agar bersukarela ikut serta dalam proses pembangunan, karena masyarakat merupakan agen-agen aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Y., Suswandi, P. E., & Adenan, M. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–7.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77–102. <https://doi.org/10.21009/JPEB.001.1.5>
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Prenadamedia Group.
- Imron, C., & Satria, D. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, kesehatan, Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur 2011-2016. *Jurnal Ilmiah*.
- Kali, K. P. I. B., & Brata, A. G. (2016). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi provinsi Kawasan Indonesia Bagian Timur Periode 2006-2013. *Jurnal Universitas Atma Jaya*.
- Kuncoro, V. K. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Karesidenan Besuki. *Skripsi*.
- Kurniangsih, T. (n.d.). *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)*.

- Larassita, Y. F. (2016). Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014. *Skripsi*.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 13(1), 50–60.
- Reksohadiprojo, S. (2001). *Ekonomika Publik*. BPFE.
- Safira, S., Djohan, S., & Nurjana, N. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Infrastruktur Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 21(2), 11–16.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capita; *JSTOR*, 51(1), 1–17.
- Simanjutak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Penerbit Graha Ilmu.
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.
- Suparmoko, M. (1996). *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Bpfe-UGM.
- Syalkahfi, M. A. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1999-2014. *Skripsi*.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia* (8th ed.). Erlangga.
- Winarti, A., Purwanti, & Yulia, E. (214 C.E.). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan Dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. *Skripsi*.
- Zulyanto, A. (2016). Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 115–138.